



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO.451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014

**Upaya United Nations Development Programme melalui
Proyek SWARGA dalam Meningkatkan Jumlah
Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di DPRD
Provinsi DKI Jakarta**

Skripsi

Oleh

Egy Tania

2013330136

Bandung

2017

Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Terakreditasi A

SK BAN-PT NO.451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014

**Upaya United Nations Development Programme melalui
Proyek SWARGA dalam Meningkatkan Jumlah
Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di DPRD
Provinsi DKI Jakarta**

Skripsi

Oleh:

Egy Tania

2013330136

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO.451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014

**Upaya United Nations Development Programme melalui
Proyek SWARGA dalam Meningkatkan Jumlah
Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di DPRD
Provinsi DKI Jakarta**

Skripsi

Oleh:

Egy Tania

2013330136

Pembimbing:

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



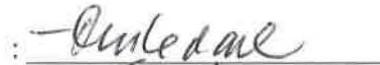
Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Egy Tania
Nomor Pokok : 2013330136
Judul : Upaya United Nations Development Programme melalui
Proyek SWARGA dalam Meningkatkan Jumlah Perempuan
sebagai Pengambil Keputusan di DPRD Provinsi DKI Jakarta

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 19 Juni 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Sapta Dwikardana Ph.D

: 

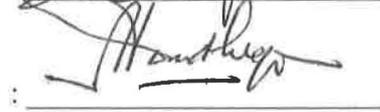
Sekretaris

Elisabeth A.S Dewi, Ph.D.

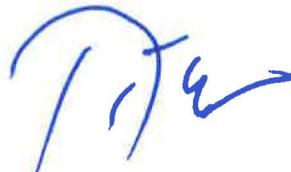
: 

Anggota

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Egy Tania
NPM : 2013330136
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Upaya United Nations Development Programme melalui Proyek SWARGA dalam meningkatkan Jumlah Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di DPRD Provinsi DKI Jakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 25 Juli 2017



Egy Tania

ABSTRAK

Nama : Egy Tania
NPM : 2013330136
Judul : Upaya United Nations Development Programme melalui Proyek SWARGA dalam Meningkatkan Jumlah Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di DPRD Provinsi DKI Jakarta

Pada era yang semakin modern kini pemerintahan sebuah negara bukanlah satu-satunya aktor yang dapat terlibat dalam penciptaan demokrasi dan kesetaraan gender di dalam wilayahnya. Organisasi Internasional telah menjadi salah satu aktor pendukung yang dapat ikut terlibat langsung dalam proses pembangunan dunia. Salah satu Organisasi Internasional yang paling utama terlibat dalam membantu proses pembangunan sebuah negara adalah United Nations Development Programme (UNDP). Salah satu contoh keterlibatan UNDP dalam membantu proses pembangunan sebuah negara yakni melalui proyek SWARGA yang dilaksanakan di Indonesia. Proyek SWARGA memiliki tujuan utama untuk meningkatkan partisipasi perempuan di pemerintahan di Indonesia sebagai respon terhadap masalah pembangunan yang ada di Indonesia, yakni masih minimnya keterwakilan perempuan di institusi pemerintahan terutama sebagai pengambil keputusan. Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan bagi peneliti yakni “bagaimana upaya UNDP melalui proyek SWARGA dalam meningkatkan jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan di DPRD Provinsi DKI Jakarta?”. Sesuai dengan perannya sebagai aktor internasional, UNDP melakukan berbagai upaya melalui kegiatan-kegiatan seperti peningkatan kesadaran publik akan pentingnya peran perempuan, penguatan kapasitas calon anggota legislatif perempuan, memperkuat KPP-RI dan membentuk basis data yang terpusat. Setelah mengetahui upaya-upaya yang dilakukan UNDP melalui proyek SWARGA serta melakukan analisa pada data keterwakilan perempuan yang peneliti peroleh dari DPRD Provinsi DKI Jakarta, peneliti mendapatkan bahwa belum terjadi peningkatan jumlah perempuan yang memiliki posisi sebagai pengambil keputusan pada DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa UNDP sebagai organisasi internasional memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam keterlibatannya dengan aktor negara.

Kata kunci: UNDP, perempuan, pemerintahan, SWARGA, Partisipasi

ABSTRACT

Name : Egy Tania
NPM : 2013330136
Title : The Effort of United Nations Development Programme through SWARGA Project in Increasing The Number of Women as a Decision Maker in DPRD Provinsi DKI Jakarta

In an increasingly modern era today the government of a country is not the only actor who can be involved in the creation of democracy and gender equality within its territory. International organizations have become one of the supporting actors who can be directly involved in the development process of the world. One of the most important International Organizations involved in assisting the development process of a country is the United Nations Development Program (UNDP). One example of UNDP's involvement in assisting the country's development process is through the SWARGA project implemented in Indonesia. The SWARGA project has the main objective of increasing the participation of women in government in Indonesia in response to development problems in Indonesia, namely the lack of representation of women in government institutions, especially as decision makers. This then raises the question for the researcher, "how is UNDP's effort through SWARGA project in increasing the number of women as decision maker in DKI Jakarta Provincial DPRD?". In accordance with its role as an international actor, UNDP is making efforts through activities such as raising public awareness of the importance of women's roles, strengthening the capacity of women legislative candidates, strengthening KPP-RI and establishing a centralized database. After knowing the efforts made by UNDP through the SWARGA project and analyzing the data of women representation obtained by the Jakarta Provincial Parliament, the researcher found that there has not been an increase in the number of women who have the position of decision makers in the DKI Jakarta Provincial Legislative Council. It shows that UNDP as an international organization has limitations in its involvement with state actors.

Keywords: UNDP, women, government, SWARGA, Participation

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah mengizinkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Kiranya berkat-Nya senantiasa melimpahi kehidupan dan keberhasilan bagi umat yang takwa kepada-Nya.

Penulisan penelitian ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh mata kuliah seminar dan melanjutkan mata kuliah skripsi untuk memperoleh gelar sarjana Politik di program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Ide yang penulis ajukan sebagai mata fokus dari karya ini adalah Upaya United Nations Development Programme melalui proyek SWARGA dalam Meningkatkan Jumlah Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Penulis terdorong untuk meneliti kasus ini karena melihat pentingnya peran perempuan di ranah politik dan pemerintahan pada era modern ini.

Akhir kata, penulis meminta maaf jika ada keasalahan, baik secara pengetikan, struktur bahasa, maupun argumen yang disampaikan. Kiranya penelitian ini dapat dievaluasi agar kian bermanfaat bagi orang lain. Jika adapun kritik dan saran yang dapat membuat tulisan ini menjadi semakin baik, penulis dengan senang hati akan menerima.

Bandung, 25 Juli 2017

Egy Tania

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji syukur dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Tuhan YME yang senantiasa menyertai penulis dalam segala kondisi terutama selama masa perkuliahan. Penulis juga ingin berterima kasih sedalam-dalamnya terhadap pihak-pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Shabir Hassnal dan Enung Nurochmah selaku orang tua kandung penulis yang telah menjadi penyemangat terbaik bagi penulis. Karena doa dan dukungan yang tiada henti penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Tassa Remisha, Sukma Dwi Andrina, dan Nadira *Crumble* selaku kakak dan adik kandung penulis. Terima kasih atas dukungan serta segala masukan yang diberikan. Semoga kita mampu membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua kita.
3. Mbak Elisabeth A. Satya Dewi a.k.a Mbak Nophie selaku dosen pembimbing atas waktu ditengah kesibukannya sebagai Ketua PACIS. Terima kasih atas ilmu serta bimbingannya dalam proses mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas waktunya untuk membaca, mengoreksi, memberikan masukan serta kesediaannya membalas pesan singkat dari penulis. Karena kebaikan hati serta bimbingan beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Anak Agung Gede Dharma Sewaka Perwita, *my 24/7 partner and support system*. Terima kasih telah menjadi kakak yang baik bagi

penulis selama di Bandung. Terimakasih untuk selalu ada dan mau direpotkan oleh penulis dengan berbagai hal terutama ketika penulis jatuh sakit atau *rewel* karena merasa putus asa dalam proses pengerjaan skripsi ini. Idi Adun!

5. Bidadari UNPAR, Dessyta Octavera, Kania Anjani, Fabiola Widi, Zefanya Claudia, Sarah Lucia, Meylina Sarah, Marilyn Chandra, Claudia Adis, dan Tiffany Clara. Apakah aku tanpa kehadiran kalian di Bandung? Penulis menyayangi kalian meskipun kalian semua berkhianat (lulus *duluan*)
6. Bapak Eddy Alamsyah selaku staff sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menunjang skripsi ini.
7. Mbak Is, selaku bunda bagi penulis selama berada di lingkungan kampus. Terima kasih untuk perhatian mbak is kepada penulis sejak penulis tergabung dalam staff Internal HMPSIHI hingga penulis menyelesaikan studinya di FISIP UNPAR.
8. Cathrine Frediana, Cheladevanua Chanta, Jarpul, Andra, Uga, Pace, Aldo, dan segenap teman-teman yang selalu muncul dengan pertanyaan “malam kemana?” dan yang senantiasa dengan sabar mendengar curhat *kegalauan* penulis.
9. MMM: Novi, Vina, Mita, Chusni, Wenny, Lingga, sahabat yang ada sedari SMA hingga sekarang. Terimakasih untuk dukungannya kepada penulis untuk segera menyelesaikan kuliah dan kembali ke ibu kota.

10. LOL: Chyntia, Sesa, Galih, Ega, Nabila sahabat penulis sejak masa belum mengenal pensil alis hingga sekarang. Terimakasih untuk dukungannya, serta suka duka canda tawa bersama penulis, walaupun lebih banyak drama di antara kita.
11. Yudha Satrio dan keluarga, terima kasih untuk jamuan makan siang di rumah ketika akhir bulan. Sahabat-sahabat; DRamos, Dara Albitya, Dinar Arif, Bhareno Barus, Ruben, Tania, Bardan.
12. *Last but not least*, terima kasih Kota Bandung, untuk udara sejuk dan pengalaman yang telah diberikan, serta kenangan yang akan penulis rindukan. *“Dan Bandung bagiku bukan hanya masalah geografis, lebih jauh dari itu melibatkan perasaan, yang bersamaku ketika sunyi” -Pidi Baiq*

Bandung, 25 Juli 2017

Egy Tania

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR AKRONIM	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	5
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.2.3 Pembatasan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kajian Literatur	9
1.5 Kerangka Pemikiran.....	12
1.6 Metodologi Penelitian	17

1.6.1 Metode Penelitian.....	17
1.6.2 Jenis Penelitian.....	17
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.7 Sistematika Pembahasan	18

BAB II UNDP SEBAGAI ORGANISASI YANG BERUPAYA UNTUK

MEWUJUDKAN *DEMOCRATIC GOVERNMENT* YANG LEBIH

EFEKTIF.....22

2.1 Gambaran umum United Nations Development Programme.....	23
2.1.1 <i>Sustainable Development</i>	25
2.1.2 <i>Democratic Government and Peacebuilding</i>	26
2.1.3 <i>Climate and disaster resilience</i>	27
2.2 Struktur dan Pendanaan UNDP.....	28
2.2.1 Sumber Pendanaan UNDP.....	30
2.3 Siklus Penyelenggaraan Proyek UNDP.....	32
2.4 UNDP di Indonesia.....	34
2.4.1 UNDP dalam mewujudkan <i>democratic governance</i> di Indonesia....	35
2.5 Pentingnya Peran Perempuan sebagai Bagian dari Proses Demokrasi yang Utuh di Indonesia.....	37
2.5.1 Peran UNDP dalam upaya peningkatan peran perempuan di pemerintahan Indonesia.....	40
2.5.2 Proyek Strengthening Women’s Participation and Representation..	42
2.5.3 Struktur Manajemen Proyek SWARGA.....	45

BAB III PEREMPUAN SEBAGAI PENGAMBIL KEPUTUSAN DI DPRD PROVINSI DKI JAKARTA.....	47
3.1 Gambaran Umum DPRD Provinsi DKI Jakarta.....	49
3.2 Dasar Hukum Keterwakilan Perempuan di Pemerintahan.....	52
3.3 Keterwakilan Perempuan sebagai Anggota Dewan di DPRD Provinsi DKI Jakarta.....	55
3.4 Konsep Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan di Pemerintahan.....	58
3.5 Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan di DPRD Provinsi DKI Jakarta.....	61
BAB IV UPAYA UNDP MELALUI PROYEK SWARGA DALAM MENINGKATKAN JUMLAH PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI DKI JAKARTA.....	63
4.1 Peningkatan Kesadaran Publik dan Promosi Calon Legislatif Perempuan kepada Pemilih.....	63
4.2 Penguatan Kapasitas Calon Anggota Legislatif Perempuan.....	66
4.3 Memperkuat Kaukus Perempuan Parlemen di Pusat dan Daerah dan Pembentukan Jaringan Perempuan yang Terpadu.....	70
4.4 Basis Data dan Penelitian Kebijakan untuk Membentuk Strategi pada Pemilihan Umum 2019.....	73
4.5 Dampak Upaya UNDP melalui Proyek SWARGA Terhadap Peningkatan Partisipasi Perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta.....	75
BAB V KESIMPULAN	79
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Struktur Keorganisasian UNDP

Gambar 4.1: Kegiatan Pelatihan oleh UNDP kepada Anggota Legislatif Perempuan

Gambar 4.2: Kegiatan Pelatihan oleh UNDP kepada Anggota legislatif perempuan

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Struktur Manajemen Proyek SWARGA
- Tabel 3.2 : Perempuan dengan Posisi Strategis Pengambil Keputusan pada DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014
- Tabel 3.3 : Perempuan dengan Posisi Strategis Pengambil Keputusan pada DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 : Keterwakilan Perempuan pada Kursi DPR dan DPRD

Grafik 3.3 : Perbandingan Komposisi Anggota Parlemen DPRD Provinsi DKI
Jakarta berdasarkan Gender

DAFTAR AKRONIM

AWP	Annual Work Plan
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
CEDAW	Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women
CPAP	Country Programme Action Plan
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
FGD	Focus Group Discussion
HAM	Hak Asasi Manusia
KEMENPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KPP-RI	Kaucus Perempuan Parlemen Republik Indonesia
KPU	Komisi Pemilihan Umum
MDGs	Millennium Development Goals
MENPAN	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat

NGO	Non-Governmental Organization
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OC	Organizing Committee
OECD	The Organisation for Economic Co-operation and Development
PAC	<i>Project Appraisal Community</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemilu	Pemilihan Umum
PNS	Pegawai Negeri Sipil
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SC	Steering Committee
SDGs	Sustainable Development Goals
SOP	Standart Operatiating Procudure
SWARGA	Strengthening Women’s Participation and Representation in Governance in Indonesia
TAF	The Asia Foundation
UNDP	United Nations Developement Programme
UUD	Undang-Undang Dasar
WPN	Women Parliemetary Network

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, dinamika hubungan internasional tidak lagi terbatas pada hubungan antar negara. Aktivitas transnasional kini mulai mendominasi dan menjadi sesuatu yang penting dalam membantu mengkampanyekan norma-norma internasional seperti hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan sosial. Aktivitas tersebut tidak hanya dijalankan oleh negara, namun juga oleh aktor non-negara seperti organisasi internasional, dan NGO's (*Non-Governmental Organization*).

Pada era globalisasi ini, demokrasi sebagai salah satu norma internasional banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi global. Hal tersebut tercermin dari semakin meningkatnya kebebasan pada negara-negara di dunia, terutama kebebasan hak-hak sipil dan kebebasan pada ranah politik¹. Menurut Huntington, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan demokrasi yakni faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal seperti aktor luar negeri merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi perkembangan ekonomi sosial suatu negara. Sebagai contoh, pengaruh luar negeri dianggap dapat mendorong proses demokratisasi sebuah negara, atau bahkan menghambat proses tersebut berlangsung, dan pelaku-pelaku non negara secara signifikan telah

¹ Samuel P Huntington. *Democracy's Third Wave*. <http://www.ned.org/docs/Samuel-P-Huntington-Democracy-Third-Wave.pdf>, diakses pada 19 Februari 2016

membantu proses demokratisasi gelombang ketiga². Aktor non negara seperti organisasi internasional telah banyak mengambil tindakan yang kemudian melahirkan perubahan-perubahan penting dalam kebijakan suatu negara sehingga menjadikannya memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola global saat ini³.

Dukungan terhadap penegakkan norma-norma demokratis di antara negara-negara di dunia datang dari salah satu organisasi internasional yang memiliki peran besar dalam upaya menciptakan perdamaian yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keberadaan PBB saat ini bukan hanya sebagai forum negara-negara dunia, namun juga berperan sebagai pembuat kebijakan internasional yang sangat penting. Perkembangan dunia internasional yang kompleks mendorong PBB untuk tidak hanya berfokus pada upaya mewujudkan perdamaian saja, namun juga dalam upaya mendukung penyelesaian berbagai permasalahan sosial yang terjadi di berbagai negara⁴.

Salah satu badan organisasi PBB yang memiliki fokus dalam menangani masalah ini adalah UNDP (United Nations Development Programme). UNDP merupakan salah satu bagian dari PBB yang aktif di lebih dari 170 negara. Melalui rencana lima tahunannya UNDP berupaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya alam dan manusia, serta meningkatkan standar hidup dan produktivitas⁵. Institusi internasional seperti UNDP disebut sebagai sebuah instrumen penting yang efektif

² *Ibid*

³ Margaret P Karns dan Karen A Mingst. *International Organizations: The Politics and the Processes of Global Governance*. Lynne Rienner, hal 30

⁴ David J Whittaker, *United nations in the contemporary world*, (Routledge: London, 1997) hal 6

⁵ *Ibid* hal 71

dalam memberikan dukungan bagi perkembangan demokrasi sebuah negara melalui pengadaan insentif agar negara berjalan sesuai dengan norma-norma positif, sekaligus memberi perhatian terhadap pelanggaran hak-hak sipil dan hak asasi manusia. UNDP secara umum memiliki tujuan untuk mempromosikan dan mendorong pembangunan negara dan kemajuan masyarakat, menegakan hak asasi serta demokrasi di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang masih dalam tahap pembangunan⁶.

Di Indonesia, sebagai bentuk upaya bantuan terhadap proses pembangunan negara, UNDP mengembangkan beberapa buah program. Salah satu program yang menarik minat peneliti adalah program *Strenghtening Women's Participation and Representation in Governance in Indonesia* (SWARGA). Secara luas, tujuan dari program tersebut adalah untuk mendorong terpenuhinya salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* yakni mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.⁷ Secara lebih spesifik, program SWARGA memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan sekaligus memberikan dukungan kepada pemerintah untuk lebih mendorong keterlibatan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat⁸. Program ini dilaksanakan melalui 5 pendekatan, diantaranya melalui peningkatan kesadaran publik, membangun jaringan, peningkatan kapasitas perempuan, penelitian, dan mendorong reformasi

⁶ *Ibid* hal 72

⁷ UNDP Official website.

http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/operations/projects/democratic_governance/strengthening-womens-participation-and-representation-in-governance.html, diakses pada 19 Februari 2016

⁸ UNDP. *Strenghtening Women's Participation and Representation in Governance*. <https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/IDN/SWARGA%20Prodoc%202012%20-%20Part%201-pages%201-33.pdf> (diakses pada 20 Februari 2016)

dibidang hukum, politik, pemilihan umum dan institusi⁹. Dalam menciptakan kesetaraan gender dalam politik, peran perempuan harus mampu lebih dari sekedar status hadir atau syarat kelengkapan partai. Perempuan harus bisa berpartisipasi dalam struktur pemerintahan dan proses pengambilan keputusan. Dalam demokrasi, pandangan dari kelompok-kelompok berbeda harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan atau dengan kata lain, demokrasi harus inklusif dari berbagai persepsi mengenai perempuan dan laki-laki¹⁰. Konteks kebijakan yang dimiliki Indonesia saat ini secara relatif telah mendukung kesetaraan gender. Keputusan Presiden nomer 9 tahun 2000 terkait *gender mainstreaming* dalam rencana pembangunan nasional juga merupakan satu langkah baru dalam menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap masalah gender. Pasal 17 tahun 2007 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 juga menetapkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen pada kesetaraan gender. Pada level internasional, Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) yang mengharuskan setiap negara untuk menyelaraskan hukum nasional dengan dengan hukum internasional terkait kekerasan berbasis gender. Indonesia juga telah meratifikasi Perjanjian PBB tentang hak-hak politik masyarakat sipil, namun masih mendapatkan kritik karena belum cukup menegakkan standar yang ditetapkan oleh perjanjian tersebut¹¹.

⁹ Loc.cit

¹⁰ Karam Azza dkk, *Perempuan di Parlemen: Bukan sekedar jumlah, bukan sekedar hiasan*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999) hal 6

¹¹ Loc.cit

Berdasarkan dari berbagai fakta yang ditemukan penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan UNDP dan programnya untuk melihat sejauh mana UNDP sebagai organisasi internasional menjalankan perannya.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Organisasi internasional seperti UNDP yang berperan dalam upaya penyelesaian permasalahan sosial kemanusiaan di sebuah negara melalui pelaksanaan programnya, memiliki kewajiban untuk memberikan hasil yang efektif serta dampak positif. Program SWARGA yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen didasarkan pada penciptaan demokrasi yang utuh. Demokrasi yang utuh tersebut adalah demokrasi yang menyeluruh dan menyentuh setiap elemen masyarakat tanpa terkecuali. Namun hingga saat ini Indonesia masih dihadapkan pada satu permasalahan yakni masalah partisipasi politik. Masih terdapat elemen dalam masyarakat yang belum terwakili, seperti penduduk miskin dan terutama perempuan.

Hingga saat ini kaum perempuan di Indonesia masih mengalami kesulitan untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai akibat dari adanya kendala-kendala kultural, agama, patriarki dan ekonomi¹². Jumlah representasi perempuan dalam parlemen di Indonesia masih sangat sedikit. Di Indonesia tidak ada peraturan yang membatasi peran perempuan dalam pemerintahan dan politik. Undang-undang

¹² Loc.cit.

pemilihan umum bahkan mensyaratkan partai politik untuk mengajukan minimal 30% calon legislatif perempuan dalam pemilu¹³.

Meskipun terdapat kelebihan dari kebijakan kuota tersebut, namun beberapa poin dalam undang-undang tersebut memiliki kelemahan. Penekanan terhadap kuota perempuan di dalam partai politik hanya mencakup aspek pembentukan partai dan struktur organisasi, namun tidak dalam hal pengambilan keputusan. Meskipun di dalam perundangan mengenai partai politik ditegaskan bahwa proses pengambilan keputusan di lingkup pemerintahan harus berdasarkan pada mekanisme yang demokratis, tetapi hal tersebut belum dapat menjamin akses dan kesempatan perempuan untuk berbicara dan ikut dalam proses perumusan kebijakan yang dilaksanakan oleh partai politik¹⁴. Rendahnya derajat keterwakilan perempuan dalam pemerintahan dapat dipandang sebagai sebuah tanda diskriminasi, yang kemudian dapat mengarah kepada mengurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahannya sendiri¹⁵.

Peran perempuan dalam pemerintahan dan politik seharusnya masih dapat ditingkatkan. Dukungan negara secara nyata dalam terhadap peningkatan peran perempuan dalam kehidupan berpolitik dan bernegara masih sangat diperlukan. Saat ini presentase keanggotaan perempuan dalam DPR RI baru mencapai angka 18%. Sementara presentase di DPD sudah lebih baik yakni 28% dan DPRD Provinsi

¹³ Op. Cit., Karam Azza, hal 6

¹⁴ Mukhamad Murdiono, *Perempuan Dalam Parlemen: Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan pada Pemilu Legislatif 2009*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2009)

¹⁵ Dewi Haryani S, *Kepemimpinan Perempuan: Perubahan Paradigma dari politik gagasan ke politik kehadiran*, Jurnal Perempuan, hal 9

rata-rata 16%¹⁶. Permasalahan lain yang timbul yakni masih adanya pembatasan peran perempuan sebagai pengambil keputusan. Peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan belum mencapai potensi maksimal¹⁷. Meskipun secara jumlah keanggotaan perempuan di lembaga eksekutif telah mencapai angka 48%, namun hanya 13% yang memegang posisi pengambilan keputusan. Disamping itu, pada tahun 2014, terjadi penurunan jumlah calon legislatif perempuan. Keseluruhan calon legislatif perempuan yang terpilih pada pemilu tahun terakhir tahun 2014 diperkirakan hanya mencapai 14%. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan ketika dibandingkan dengan hasil pemilihan umum pada tahun 2009 dimana keterwakilan perempuan di DPR-RI mencapai angka 18%¹⁸.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan berfokus untuk menganalisa upaya UNDP melalui program SWARGA dalam kegiatan-kegiatannya yang dilaksanakan di DKI Jakarta pada tahun 2011-2015 serta dampaknya terhadap peningkatan partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan di Pemerintahan, khususnya di Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Peneliti akan memfokuskan area penelitian pada kegiatan *capacity building* yang diberikan oleh UNDP kepada anggota legislatif perempuan di DPRD provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini juga berfokus terhadap upaya reformasi birokrasi oleh Kementerian Administrasi dan Birokrasi dalam

¹⁶ UNDPIndonesia, *UNDP SWARGA*, You Tube. Online video clip, <https://www.youtube.com/watch?v=ZMrQKP9qYwQ> (diakses pada 30 Maret 2016)

¹⁷ Karam Azza, *op.cit* hal 7

¹⁸ Hasan Ramadhan. *Menurunnya Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen*. Jurnal Perempuan: 2014. <http://www.jurnalperempuan.org/menurunnya-jumlah-keterwakilan-perempuan-di-parlemen.html>, diakses pada 27 Maret 2016

mendukung keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam pemerintahan.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan untuk mengkaji keterlibatan dan peran UNDP di Indonesia adalah: **“Bagaimana upaya UNDP melalui proyek SWARGA dalam meningkatkan jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan di DPRD Provinsi DKI Jakarta?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya UNDP sebagai organisasi internasional dalam mendorong sebuah negara membangun pemerintahan yang lebih demokratis, yakni melalui pelaksanaan program SWARGA. Secara lebih rinci, penelitian ini memiliki tujuan:

- a. Menjelaskan peran-peran dan dukungan dari lembaga internasional UNDP dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis.
- b. Mengevaluasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program SWARGA.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam melihat upaya serta peran UNDP sebagai sebuah organisasi internasional dalam menjalankan program pembangunannya di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk melihat bagaimana sebuah organisasi internasional sebagai aktor non negara menjalankan fungsinya untuk membantu menyelesaikan permasalahan di suatu negara melalui program-programnya. Selain itu, secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam pengembangan organisasi.

1.4 Kajian Literatur

Penelitian mengenai upaya suatu yang dilaksanakan oleh organisasi internasional melalui sebuah program sebelumnya pernah dilaksanakan oleh beberapa peneliti, diantaranya:

“Pengaruh Peran United Nations Development Programme dalam Peningkatan Partisipasi Politik Wanita di Indonesia (2006-2010)” oleh Oki Astriani dalam Media Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Artikel tersebut menganalisa pengaruh UNDP dalam upaya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia selama kurun waktu lima tahun (2006 hingga 2010). Artikel tersebut juga memaparkan serta memberi deskripsi singkat mengenai program-program apa saja

yang UNDP jalankan di Indonesia dalam hubungannya dengan menciptakan pemerintah yang demokratis¹⁹.

Kajian mengenai peran UNDP sebagai aktor non-negara pendukung *democratic governance* juga ditulis oleh dalam sebuah penulisan tesis berjudul “Demokratisasi di Indonesia: Peran United Nations Development Programme (UNDP) dalam Pemilu 1999 di Indonesia oleh Iing Nurdin. Penelitian ini memaparkan keterkaitan antara faktor-faktor eksternal atau dunia internasional dalam proses demokratisasi di suatu negara, cara-cara atau strategi yang digunakan oleh pihak eksternal dalam upayanya memberikan bantuan untuk demokratisasi dan bagaimana hasilnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sebuah kasus keterlibatan atau peran dari dunia internasional melalui UNDP dalam pemilu 1999 di Indonesia. Untuk menjelaskan peran UNDP dalam demokratisasi di Indonesia (pemilu 1999), digunakan kerangka teori tentang demokrasi dan demokratisasi serta strategi apa yang digunakan oleh dunia internasional dalam upayanya membantu proses demokrasi apakah melalui *reforming state, mobilizing grassroots dan mediating between state and grassroots*. Hasil penelitian di lapangan yang dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam, membuktikan bahwa UNDP mempunyai peran yang signifikan dalam membantu penyelenggaraan pemilu tahun 1999 di Indonesia²⁰.

¹⁹ Oki Astriani, *Peran United Nations Development Programme dalam Pemilu 1999 di Indonesia*, (Jurnal Analisis Hubungan Internasional: volume 2, 2013), [http://journal.unair.ac.id/pengaruh-peran-united-nations-development-programme-dalam-peningkatan-partisipasi-politik-wanita-di-indonesia-\(2006-2010\)-article-4694-media-131-category-8.html](http://journal.unair.ac.id/pengaruh-peran-united-nations-development-programme-dalam-peningkatan-partisipasi-politik-wanita-di-indonesia-(2006-2010)-article-4694-media-131-category-8.html), diakses pada 6 Maret 2016

²⁰ Iing Nurdin, *Demokratisasi di Indonesia : peran United Nations Development Programme (UNDP) dalam Pemilu 1999 di Indonesia*, <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-76243.pdf>, diakses pada 6 Maret 2016

Kajian mengenai peran UNDP dan bantuan teknisnya juga dipaparkan dalam buku yang berjudul *Effectiveness and Reform of The United Nations Development Programme* oleh Stephen Klingbiel. Buku tersebut membahas bagaimana UNDP berperan sebagai aktor internasional yang ikut ambil andil dalam proses pembangunan suatu negara secara efektif melalui program dan proyek-proyeknya. Dalam menganalisa peran efektif UNDP sebagai organisasi internasional, Stephen Klingbiel menggunakan beberapa kerangka yang meliputi faktor-faktor yang relevan terhadap efektifitas organisasi internasional. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni tingkat konseptual, struktur dan kebijakan, dan implementasi. Dalam bukunya, Klingbiel mengungkapkan bahwa bantuan teknis yang dijalankan oleh organisasi internasional seperti UNDP sering kali bersifat tidak efektif dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab seperti sistem donor, input, dan kurangnya strategi²¹.

Dari ketiga penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian ini berbeda dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya karena penelitian ini mencoba melihat upaya UNDP melalui proyek SWARGA dalam mendorong terciptanya pemerintahan Indonesia yang lebih demokratis dengan memfokuskan pada peningkatan partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan di parlemen. Penulis mengambil studi kasus pada DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk lebih dapat melihat dampak yang diberikan oleh proyek SWARGA yakni peningkatan

²¹ Stephen Klingbiel, *Effectiveness and Reform of the United Nations Development Programme*, (London: Frank Cass, 1999) hal 2-3

partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan serta menganalisa kesesuaian tujuan proyek dan output yang dihasilkan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam melihat upaya UNDP menjalankan perannya, penulis menggunakan kerangka pemikiran yang terdiri dari teori liberalisme dan liberalisme institusional, konsep organisasi internasional, peran United Nations Development Programme dan konvensi CEDAW. Dalam mengkaji keterlibatan Organisasi Internasional di dalam sebuah negara, perspektif liberalisme digunakan sebagai salah satu kerangka pikir yang dapat mendukung penelitian ini. Liberalisme merupakan sebuah pandangan yang melihat bahwa hubungan antar negara tidak hanya didominasi oleh hubungan antar negara tetapi aktor non negara seperti organisasi internasional juga memiliki peran untuk menciptakan perdamaian²². Perspektif liberalisme berhubungan erat dengan munculnya negara negara di bawah pengaruh modernisasi. Para pemikir liberal beranggapan bahwa modernisasi merupakan proses yang melibatkan perkembangan diberbagai bidang dalam kehidupan. Proses dari modernisasi tersebut memperluas ruang lingkup untuk kerjasama antar negara. Liberalisme memandang organisasi internasional sebagai arena dimana negara dapat berinteraksi dan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah umum serta mempromosikan norma-norma bersama dan menegakkan ketertiban²³. Para pemuka liberalisme mengemukakan bahwa konflik dapat dihindari dengan

²² Robert Jackson & G. Sorensen, *Introduction of International Relations: Theories and Approaches*, (Oxford university press: 2010), Hal 105

²³ *Op.cit.*, Margaret P Karns dan Karen A Mingst,

mengedepankan interdependensi dan kerjasama. Liberalisme juga memiliki pandangan bahwa keberhasilan dalam sistem internasional akan terjadi apabila negara mengedepankan kerjasama.²⁴

Salah satu aliran dari paham liberalisme adalah liberalisme institusional. Liberalisme institusional memiliki pandangan dominan bahwa kerjasama dalam politik diantara negara-negara di dunia dapat ditingkatkan melalui konstruksi dan dukungan terhadap institusi multilateral. Dalam perspektif liberalisme institusional, dipercayai bahwa institusi memiliki peran dan dapat memfasilitasi kerjasama yang bersifat saling menguntungkan di dalam dan antar negara di dunia. Liberalisme institusional umumnya memiliki tujuan sosial yakni untuk mempromosikan pengaruh positif terhadap keamanan, kesejahteraan, dan kebebasan manusia, sebagai hasil dari tatanan dunia yang bebas²⁵.

Selain mempercayai bahwa institusi internasional dapat membantu memajukan kerjasama antar negara, Sorensen dalam bukunya menjelaskan bahwa institusi dapat membantu menghilangkan ketidakpercayaan antar negara. Joseph Nye dalam bukunya juga menyebutkan bahwa institusi mampu menciptakan iklim perdamaian yang stabil. Salah satu bentuk dari institusi internasional tersebut adalah organisasi internasional. Organisasi internasional berkembang sebagai sebuah institusi formal diluar negara yang memiliki peran penting dalam sistem internasional di era globalisasi saat ini. Keberadaan organisasi internasional menjadi penting terutama

²⁴ *Perspektif Liberalisme dalam Teori Hubungan Internasional*, ilmu-hi.com. <http://www.ilmu-hi.com/perspektif-liberalisme-dalam-teori-hubungan-internasional/>, diakses pada 8 Maret 2016

²⁵ Robert O. Keohane, *Twenty Years of Institutional Liberalism*, (International relation no 26, 2012), hal 125

dalam keadaan dimana negara tidak mampu menyelesaikan permasalahan internal yang mereka miliki, yang menyangkut isu politik, ekonomi, ataupun isu-isu lainnya. Secara umum organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kerjasama internasional yang melembaga antar negara dan berlandaskan atas sebuah perjanjian dasar untuk melaksanakan fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan staf secara berkala²⁶.

Menurut Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organizations*, organisasi internasional memiliki tiga peran utama yakni sebagai instrumen atau alat anggota untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, sebagai arena atau forum dimana para anggota bertemu, bersepakat, dan membentuk seperangkat norma dan hukum, dan sebagai *independent actor* yang tidak bisa bertindak secara otonom. Organisasi internasional melakukan berbagai upaya dalam menjalankan perannya, seperti melalui mobilisasi sumber daya, membangun hubungan dengan pemerintah pusat dan lokal, membangun hubungan dengan organisasi internasional lain dan hubungan dengan organisasi non pemerintah lokal²⁷.

Dalam penelitian ini, upaya UNDP dalam menjalani perannya sebagai aktor non negara, terwujud dalam bentuk program-program yang dilaksanakan oleh UNDP baik secara mandiri maupun dengan bekerjasama dengan pemerintah suatu negara atau pihak lainnya. Hal tersebut terkait dengan sifat organisasi internasional yang

²⁶ Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, (Jakarta: PT Refika Aditama: 1998) hal 2

²⁷ Clive Archer, *International Organizations*, (Routledge: 2001). Hal 66

dalam pelaksanaan programnya seringkali bermitra dengan pihak lain diluar organisasinya. Kegiatan organisasi internasional yang berhubungan dengan pihak luar dari organisasinya tersebut termasuk kedalam kegiatan organisasi yang bersifat eksternal. Sebagai contoh, dalam penelitian ini UNDP bermitra dengan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan programnya. Sedangkan kegiatan organisasi internasional yang berkaitan dengan anggotanya sendiri dikategorikan sebagai kegiatan yang bersifat internal. Salah satu contoh dari kegiatan internal keanggotaan organisasi internasional adalah membentuk sekumpulan hukum dasar yang mengatur bagaimana organisasi tersebut menjalankan fungsi dan aktivitasnya, baik di dalam lingkup organisasi itu sendiri maupun dengan organisasi lain²⁸.

UNDP dalam melaksanakan proyek SWARGA di Indonesia juga dilatarbelakangi oleh konvensi CEDAW. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi dengan UU RI No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Ratifikasi dengan undang-undang berarti bahwa konvensi tersebut telah menjadi bagian dari hukum nasional. Konvensi CEDAW diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, diakui dunia sebagai Prasasti Hak Perempuan (*Bill of Rights of Women*). Seiring dengan perkembangannya, konvensi CEDAW diakui dunia sebagai tolak ukur kesetaraan dan keadilan gender²⁹.

²⁸ Suwardi, Sri Setianingsih, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Universitas Indonesia: 2013), hal 190

²⁹ Achie Sudiarti, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014) hal 27

Dalam kaitannya dengan kesetaraan dalam kehidupan politik dan publik, dalam konvensi CEDAW pasal 7 tercantum bahwa negara memiliki kewajiban untuk:

- a. Melaksanakan langkah-langkah untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik.
- b. Menjamin bagi perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki untuk:
 - memberikan suara dalam semua pemilihan umum dan jajak pendapat publik;
 - dapat dipilih dalam pemilihan untuk semua lembaga yang didasarkan atas pemilihan;
 - berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya;
 - memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat; dan
 - berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dan politik negara.³⁰

³⁰ *Ibid* hal 63

1.6 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam menentukan upaya UNDP melalui program SWARGA yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi fenomena yang umumnya berasal dari masalah-masalah sosial. Beberapa upaya yang dilibatkan dalam proses penelitian dengan menggunakan metode kualitatif antara lain dengan mengumpulkan data spesifik, menganalisis data secara induktif serta menafsirkan makna dari suatu data yang ada³¹. Selain itu, penelitian kualitatif bertujuan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan³².

1.6.2 Jenis penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif eksploratif, yaitu:

“Suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitannya antara variabel-variabel yang ada.”³³

³¹ John W Cresswell, *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran*, (Yogyakarta: 2010), hal 4-5

³² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia) hal 14

³³ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara) hal 26

Melalui metode deskriptif eksploratif, penulis akan mendeskripsikan bagaimana program SWARGA menghasilkan keluaran atau *outcome* yang sesuai dengan tujuan program berdasarkan data yang diperoleh. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif eksploratif karena jenis penelitian ini dapat membantu penulis menjawab pertanyaan yang akan diteliti.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah berupa studi pustaka dengan memanfaatkan data-data sekunder yang didapatkan melalui data resmi instansi, laporan resmi, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang telah diolah menjadi data yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa dan simpulkan sesuai permasalahan yang diteliti. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis juga berupaya untuk melakukan proses triangulasi data melalui wawancara dengan narasumber, namun tidak dapat terlaksanakan karena adanya keterbatasan. Untuk itu skripsi ini tentunya masih memiliki kekurangan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dituangkan kedalam lima bab dan masing-masing bab dibagi kembali kedalam beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan. Bab ini mencakup uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II mencakup uraian mengenai gambaran umum organisasi internasional United Nations Development Programme. Bab ini juga menguraikan peran UNDP sebagai organisasi internasional yang membantu negara dalam membangun pemerintahan yang lebih demokratis, yakni melalui peningkatan peran perempuan di dalam pemerintahan.

Bab III memuat gambaran umum mengenai DPRD DKI Jakarta serta data-data mengenai kondisi keterwakilan perempuan di DPRD DKI Jakarta yang diperoleh oleh peneliti baik yang merupakan data primer dan data sekunder untuk kemudian dijadikan bahan analisa dampak program SWARGA di bab selanjutnya.

Bab IV memuat pembahasan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh UNDP melalui program SWARGA, berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di DKI Jakarta. Bab ini juga mencakup analisis persepsi dari kegiatan-kegiatan program SWARGA tersebut untuk menentukan dampak dari upaya dan peran UNDP sebagai organisasi internasional dalam meningkatkan peran perempuan di pemerintahan.

Bab V memuat kesimpulan dan saran. Bab ini mencakup kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran sebagai masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

1.8 Timeline

Nama Kegiatan	Bulan											
	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei						
Revisi Bab I	■	■										
Riset Bab II		■	■									
Bab II		■	■	■	■							
Konsultasi			■	■								
Riset Bab III				■	■							
Bab III				■	■	■	■					
Konsultasi					■	■						
Bab IV						■	■	■				
Konsultasi							■	■				
Bab V dan Penyelesaian								■	■	■	■	
Penyelesaian										■	■	■

Nama Kegiatan	Revisi Bab I
Keterangan	Revisi yang dilakukan setelah pengumpulan draft merah
Nama Kegiatan	Revisi Bab II
Keterangan	Konsultasi dilakukan pada minggu ke 3 sedangkan revisi dilakukan pada minggu ke 3 dan 4 lalu akan diperiksa pada konsultasi berikutnya atau satu minggu setelah pengerjaan bab II
Nama Kegiatan	Revisi Bab III
Keterangan	Konsultasi dilakukan pada minggu ke 3 sedangkan revisi dilakukan pada minggu ke 3 dan 4 lalu akan di periksa pada konsultasi berikutnya atau satu minggu setelah pengerjaan bab III
Nama Kegiatan	Revisi Bab IV

Keterangan	Konsultasi dilakukan pada minggu ke 3 sedangkan revisi dilakukan pada minggu ke 3 dan 4 lalu akan di periksa pada konsultasi berikutnya atau satu minggu setelah pengerjaan bab IV
Nama Kegiatan	Revisi Bab V
Keterangan	Konsultasi dilakukan pada minggu ke 3 sedangkan revisi dilakukan pada minggu ke 3 dan 4 lalu akan di periksa pada konsultasi berikutnya atau satu minggu setelah pengerjaan bab V
Nama Kegiatan	Finishing
Keterangan	Melakukan pengulangan cek terhadap keseluruhan konten serta footnote